



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 75 /I/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 145);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 41);
15. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pejabat Pembuat komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:
 1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) rancangan Kontrak.
 2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. menandatangani Kontrak;
 4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:

1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pekerjaan dan serah terima barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung masing-masing kegiatan tiap bagian lingkup Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


† **SYAMSUL SYAIR** †

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 75 / I /2015
TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	KET
BAGIAN ADM. KEMASYARAKATAN DAN KESRA					
1	Facilitasi Kegiatan Keagamaan	Rp 210,200,000	USNAWATI, S.E	Dra. Hj. SULEHARNI	
2	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemuda Olahraga, Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kesbang Pol, Keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 79,400,000	USNAWATI, S.E	Dra. Hj. SULEHARNI	
3	Facilitasi Penguatan dan Pengembangan UKS	Rp 79,400,000	USNAWATI, S.E	MURSALIM, SIP	
4	Koordinasi Percepatan Penanganan Zoonosis Di Kab. Luwu Utara	Rp 64,350,000	USNAWATI, S.E	MURSALIM, SIP	
5	Temu Koordinasi dan Rapat Koordinasi Dengan Lembaga Teknis Daerah dan Instansi terkait dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemuda Olahraga, Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kesbang Pol, Keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 126,900,000	USNAWATI, S.E	USNAWATI, S.E	
6	Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemuda Olahraga, Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, Kesbang Pol, Keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 91,500,000	USNAWATI, S.E	USNAWATI, S.E	
7	Facilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kab. Luwu Utara	Rp 211,950,000	USNAWATI, S.E	USNAWATI, S.E	
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
8	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Organisasi Ketatalaksanaan	Rp 221,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	DRS. NURSALIM, M.Si	
9	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi (Lakip)	Rp 56,425,000	INDRANI BASRI, S.Sos	DRS. NURSALIM, M.Si	
10	Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 116,797,000	INDRANI BASRI, S.Sos	TOURIS, S.Sos	
11	Penyusunan DUK, SKP dan KGB	Rp 12,725,000	INDRANI BASRI, S.Sos	TOURIS, S.Sos	
12	Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Rp 103,625,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RISWANA, S.Th	
13	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp 64,175,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RISWANA, S.Th	
14	Evaluasi Jabatan	Rp 148,253,000	INDRANI BASRI, S.Sos	ASHAR, S.Sos	
15	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (PENJA)	Rp 10,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	ASHAR, S.Sos	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	KET
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA					
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 21,900,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RASNAH, S.Sos	
17	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 3,555,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RASNAH, S.Sos	
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 100,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
19	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 408,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RASNAH, S.Sos	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 90,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 25,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RASNAH, S.Sos	
22	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Rp 1,000,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MEGAWATI LUSSA, S.Sos	
23	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Aset	Rp 2,623,872,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MEGAWATI LUSSA, S.Sos	
24	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 99,000,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
25	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Rp 206,400,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
26	Pengadaan Meubelair	Rp 239,500,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 194,180,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
28	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 145,920,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 420,000,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 60,000,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
31	Pengadaan Lampu Jalan	Rp 155,400,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
32	Pemeliharaan Lampu Jalan Umum	Rp 563,200,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
33	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 60,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RASNAH, S.Sos	
34	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas	Rp 500,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MEGAWATI LUSSA, S.Sos	
35	Facilitasi Penertmaan Kunjungan Kerja Tamu Sekretariat Daerah	Rp 575,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RASNAH, S.Sos	
36	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Rp 178,500,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RASNAH, S.Sos	
37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp 1,700,700,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 480,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Keluarga KDH/WKDH	Rp 90,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
40	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Rp 92,800,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
41	Dialog/Audiens dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi dan Kemasyarakatan	Rp 310,500,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
42	Penertmaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen	Rp 330,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
43	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Rp 120,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
44	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 750,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	
45	Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/WKDH	Rp 126,000,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUHLIS BASO, S.Sos	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	KET
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
46	Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan APBD melalui Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP)	Rp 302,800,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	
47	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	Rp 11,500,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	
48	Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa	Rp 615,500,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	
49	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Rp 48,300,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	
50	Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3)	Rp 11,500,000	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	A. BAKRI NIRWAN, S.Sos	
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL					
51	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 351,580,000	ARI SETIAWAN, S.STP	ARI SETIAWAN, S.STP	
52	Fasilitasi Penguatan PPID	Rp 6,250,000	ARI SETIAWAN, S.STP	SOFYAN DJAFAR, S.IP	
53	Pelayanan Saksi Komunikasi Rahasia dan Komunikasi Daerah	Rp 25,000,000	ARI SETIAWAN, S.STP	RANDA TANGDESAK	
54	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp 620,770,000	ARI SETIAWAN, S.STP	ARI SETIAWAN, S.STP	
55	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Rp 96,400,000	ARI SETIAWAN, S.STP	ARI SETIAWAN, S.STP	
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN					
56	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp 92,750,000	MUHAMMAD HADI, S.H	P. ANDI BASO, SH	
57	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rp 168,500,000	MUHAMMAD HADI, S.H	AMRIS, SH	
58	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Rp 63,500,000	MUHAMMAD HADI, S.H	AMRIS, SH	
59	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 49,600,000	MUHAMMAD HADI, S.H	NASIRAH, SH	
60	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 148,400,000	MUHAMMAD HADI, S.H	NASIRAH, SH	
61	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 58,275,000	MUHAMMAD HADI, S.H	P. ANDI BASO, SH	
62	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 46,500,000	MUHAMMAD HADI, S.H	NASIRAH, SH	
63	Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM di Daerah	Rp 37,725,000	MUHAMMAD HADI, S.H	P. ANDI BASO, SH	
64	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 53,750,000	MUHAMMAD HADI, S.H	P. ANDI BASO, SH	
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM					
65	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah	Rp 267,700,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MASTITA SOFYAN, SP	
66	Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah Daerah	Rp 141,375,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MARWANG, S.IP	
67	Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	Rp 79,125,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MARWANG, S.IP	
68	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di SDA Pelayanan Lingkungan Hidup	-	-	-	

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN	KET
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
69	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian	Rp 51,400,000	YUYU WAHYUDDIN, S.Sos	Drs. ABADI	
70	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Rp 802,300,000	YUYU WAHYUDDIN, S.Sos	YUYU WAHYUDDIN, S.Sos	
71	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Rp 174,800,000	YUYU WAHYUDDIN, S.Sos	RUJUMAN, S.Sos	
72	Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Bidang Perekonomian	Rp 71,500,000	YUYU WAHYUDDIN, S.Sos	Drs. TAHIR LULI	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				
73	Penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati	Rp 205,800,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RAMLAN MAJID, S.IP	
74	Fasilitasi dan Koordinasi Perubahan Nama Rupa Bumi	Rp 328,500,000	INDRANI BASRI, S.Sos	ABD. HARI B, S.Sos	
75	Fasilitasi Penanganan Konflik - Konflik Pertanahan dan Non Pertanahan	Rp 254,600,000	INDRANI BASRI, S.Sos	ABD. HARI B, S.Sos	
76	Koordinasi Tugas-Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp 105,250,000	INDRANI BASRI, S.Sos	MUH. ANWAR T, S.An	
77	Pengurusan Pengadaan Tanah	Rp 1,140,460,000	INDRANI BASRI, S.Sos	ABD. HARI B, S.Sos	
78	Pengadaan Tanah	Rp 20,309,540,000	INDRANI BASRI, S.Sos	ABD. HARI B, S.Sos	
79	Pengukuran Asset Tanah Pemda	Rp 121,650,000	INDRANI BASRI, S.Sos	ANDRILDHARSYAH, F,S,STP	
80	Evaluasi Kinerja Kecamatan	Rp 84,200,000	INDRANI BASRI, S.Sos	RAMLAN MAJID, S.IP	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

an. BUPATI LUWU UTARA
Pit. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL SYAIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 75 / 1 /2015
TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN	KET
1	NASIRAH, SH	19810520 200502 2 004	PENATA TK I/ III.d	KETUA	Rp 600.000	
2	ISWADY, SE	19790920 201001 1 002	PENATA MUDA / III.a	SEKRETARIS	Rp 575.000	
3	MOHAMMAD RIFAL, SE	19821228 200901 1 002	PENATA MUDA / III.a	ANGGOTA	Rp 550.000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

an. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL SYAIR